



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128

TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382

Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : bsip.nakeswan@pertanian.go.id

Nomor : B-42.2/HM.130/A5/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan
PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan
dan Kesehatan Hewan

13 Januari 2025

Yth.

Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: B-17/HM.130/A/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 dengan ini disampaikan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) tahun 2024 sebagaimana format terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.


Kepala Pusat,
Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP. 197102012002121002

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan

LAPORAN AKHIR

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



AGROSTANDAR

Tim PPID PSIPKH

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk mengembangkan aplikasi dan Mobile Apps yang merupakan pelayanan informasi secara online untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 31 Desember 2024

Kepala Pusat,



Dr. drh. Agus Susanto, M.Si

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR LAMPIRAN	VI
PENDAHULUAN	1
I. LAPORAN KEGIATAN PPID TA 2024	3
1.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	3
1.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik	4
1.3. Rekapitulasi Pelayanan Penolakan, Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan Permohonan IP PSIPKH TA 2024	6
1.4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia	7
1.5. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan	7
1.6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	8
1.7. Motto Dan Maklumat Layanan PPID PSIPKH	8
II. SEKILAS TENTANG PPID PSIPKH.....	10
III. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID PSIPKH 2024	12
3.1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) TA 2024	12
3.2. Penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH kepada masyarakat.....	12
3.3. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas PSIPKH 2024.....	13
3.4. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen	15
3.5. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai.....	15
3.6. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	16
IV. KEGIATAN PPID PSIPKH TA 2024	18
4.1. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan IP PSIPKH TA 2024.....	18
4.2. Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSIPKH.....	19
4.3. Pembinaan PPID PSIPKH ke PPID BPSI UAT	22
4.4. Sosialisasi Monev Keterbukaan IP Lingkup Kementan	23
4.5. Koordinasi Pengisian SAQ TA 2024	26
4.6. Seleksi Petugas PPID Terbaik Tahun 2024 Lingkup Kementan.....	27
4.7. Konsultasi PPID PSIPK ke PPID Utama Terkait Pengisian SAQ TA 2024.....	28
4.8. Wawancara Keterbukaan IP Tahap II Lingkup Kementan.....	28
4.9. Malam Penganugerahan Keterbukaan IP Tahun 2024.....	30
V. SARANA DAN PRASARANA PPID PSIPKH.....	33
5.1. SDM dan Anggaran PPID PSIPKH.....	33
5.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi PSIPKH	34
5.3. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi PSIPKH.....	35
VI. PENUTUP	39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Permohonan IP PSIPKH TA 2024	4
Gambar 2. Jam Pelayanan Informasi Publik PSIPKH.....	5
Gambar 3. Maklumat Pelayanan Informasi PSIPKH	6
Gambar 4. Rekapitulasi pelayanan keberatan IP PSIPKH TA 2024.....	7
Gambar 5. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik.....	8
Gambar 6. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID PSIPKH	9
Gambar 7. Kegiatan <i>Public Hearing</i> PSIPKH	10
Gambar 8. Alur Permohonan Informasi Publik	11
Gambar 9. Penyampaian Daftar Informasi Publik PSIPKH Tahun 2024	12
Gambar 10. Penandatanganan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Keterbukaan Informasi Publik.....	13
Gambar 11. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas Januari – Desember 2024	15
Gambar 12. SK Penetapan DIP PSIPKH 2024	16
Gambar 13. Penandatanganan Komitmen Bersama PPID PSIPKH TA 2024.....	19
Gambar 14. Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSIPKH	21
Gambar 15. Pendampingan PPID BPSI UAT	23
Gambar 16. Sosialisasi Monev Keterbukaan IP TA 2024	26
Gambar 17. Koordinasi Pengisian SAQ.....	26
Gambar 18. Keikutsertaan Seleksi Petugas PPID Terbaik 2024	27
Gambar 19. Konsultasi PPID PSIPKH ke PPID Utama Kementan	28
Gambar 20. Wawancara Keterbukaan IP Tahap II Kementan	30
Gambar 21. Malam Penganugerahan KIP Kementan 2024.....	32
Gambar 22. SK Tim PPID PSIPKH TA 2024.....	33
Gambar 23. Ketersediaan Anggaran PPID TA 2024.....	34
Gambar 24. Ruang Pelayanan Publik PSIPKH	35
Gambar 25. Aplikasi SiBIBIT PSIPKH	37
Gambar 26. Halaman Beranda SiTamU	38

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Permohonan Informasi Publik PSIPKH TA 2024	3
Tabel 2. Waktu Penyelesaian Pelayanan IP PSIPKH TA 2024	4
Tabel 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	7
Tabel 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	7

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Rekapitulasi PPID PSIPKH 2024	40
Lampiran 2. Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) PSIPKH TA 2024.....	41

PENDAHULUAN

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Pertanian telah menunjuk Atasan PPID Kementerian Pertanian, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian bersama PPID Utama dan 234 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk : 1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; 2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; 3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan 4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID PSIPKH membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan baik triwulan, semester maupun tahunan terkait kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2024.

I. LAPORAN KEGIATAN PPID TA 2024

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik termasuk PSIPKH diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

1.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik yang diterima Kantor PSIPKH selama periode Januari – Desember TA 2024 sebanyak **4 (empat)** permohonan. Rekapitulasi permohonan informasi publik disajikan pada tabel 1 berdasarkan data rekapitulasi permohonan di Silayan Online.

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik PSIPKH TA 2024

PORTAL PPID

Beranda

Profil

Layanan Informasi

Standar Layanan

Informasi Publik

Regulasi

FAQ

Laporan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Permohonan	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1	Rabu, 03 Jul 2024	Minggu, 07 Jul 2024	2024070301/F1A-01H/07/2024	Agus Setiawan	Perorangan	Nama Info Module menjadi peternak kambing Module menjadi peternak Sapi Teknik kesehatan ternak kambing dan sapi Alasan Belajar mandiri Belajar mandiri Belajar mandiri	Pemberitahuan 202407050005/F3-H/07/20242024-07-07 09:09:48	Telaah Selesai Diproses
2	Kamis, 11 Jul 2024	Kamis, 11 Jul 2024	2024071102/F1A-L5.H/07/2024	Ratih Purnama	Perorangan	Nama Info Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Alasan Bahan Penelitian	Pemberitahuan 202407110010/F3-H/07/20242024-07-11 11:08:34	Telaah Selesai Diproses
3	Kamis, 11 Jul 2024	Kamis, 11 Jul 2024	2024071103/F1A-LY.H/07/2024	Nopi Dwiastari	Perorangan	Nama Info Juknis Pendampingan Perpompaan PAT TA 2024 Alasan bahan belajar	Pemberitahuan 202407110010/F3-H/07/20242024-07-11 11:29:01	Telaah Selesai Diproses
4	Rabu, 30 Oct 2024	Jumat, 08 Nov 2024	2024103001/F1A-LY.H/10/2024	Azzahra Sifra Rahma Putri	Perorangan	Nama Info Rekapitulasi perjalanan dinas Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dari bulan Juli, Agustus, dan September lengkap dengan tanggal, nomor SPT, tujuan/lokasi dinas. Alasan Mengetahui kinerja pejabat dari Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai arahan Presiden Terpilih dalam Sidang Paripurna Perdana Kabinet Merah Putih.	Pemberitahuan 202410080000/F3-H/10/20242024-11-08 10:06:36	Telaah Selesai Diproses

PPID

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Beranda

Profil

Layanan Informasi

Standar Layanan

Informasi Publik

Regulasi

FAQ

Alamat:

Sekretariat PPID
Jl. Raya Pajajaran Kav E.59 Bogor 16151
Jawa Barat, Indonesia

Peta Lokasi

Gedung Kementerian Pertanian, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

www.pertanian.go.id

ppidutama

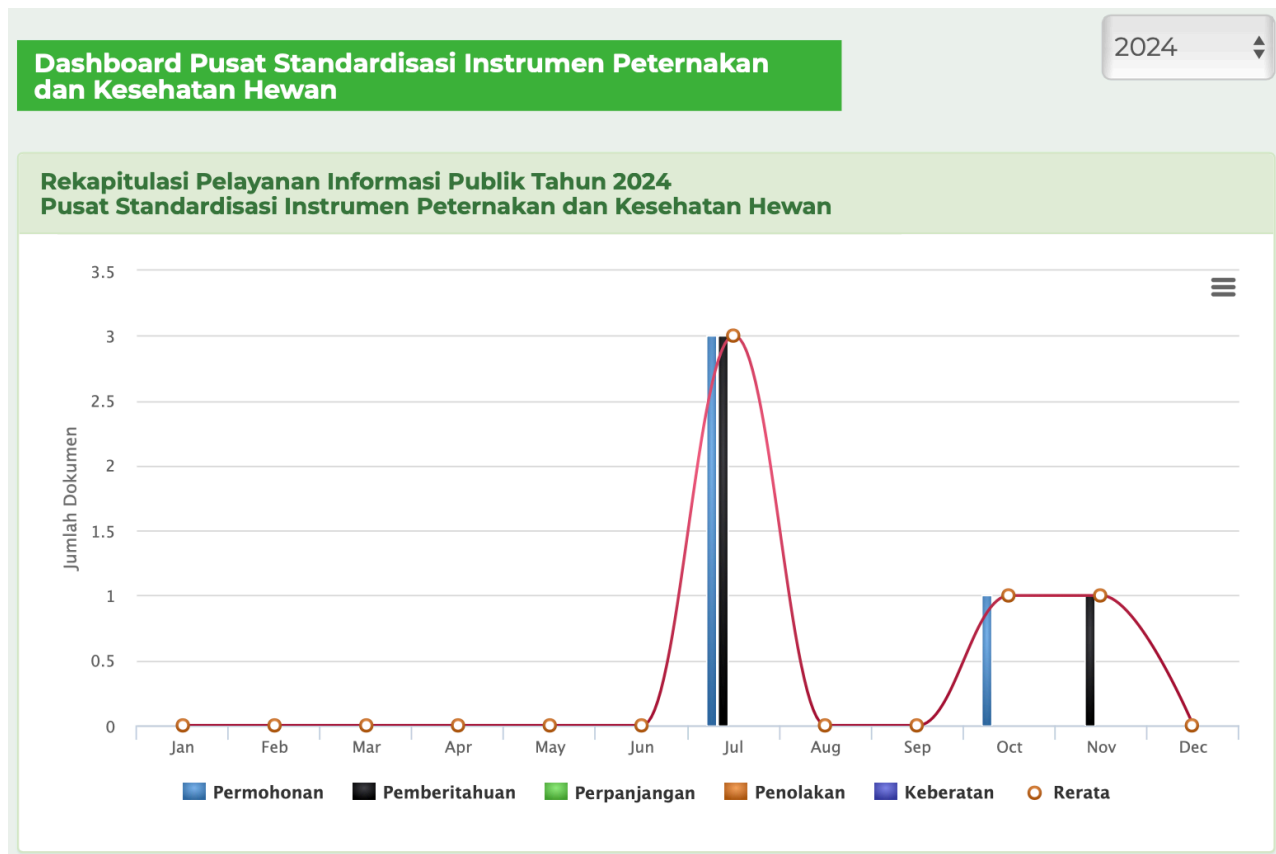
ppidkementerian

ppidkementerian

Hubungi:

HP & WA: 08271522622
Email:
bsp.nakeswan@pertanian.go.id

Rekapitulasi permohonan Informasi publik yang diterima PSIPKH melalui SILAYAN Online terekap didalam statistik permohonan IP PPID PSIPKH yang tersaji pada Gambar 1. Jangka waktu penyelesaian laporan permohonan informasi publik diselesaikan rata-rata 1 - 3 hari telah diselesaikan oleh petugas dan pejabat PPID. Permohonan IP PSIPKH paling banyak diterima pada bulan Juli sebanyak 3 (tiga) permohonan layanan IP.



Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Permohonan IP PSIPKH TA 2024

1.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik PSIPKH pada Januari – Desember 2024 rata-rata diselesaikan dalam jangka waktu 1 - 5 hari. Hal ini sesuai dengan kesepakatan penyelesaian permohonan informasi publik 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila ada tambahan waktu penyelesaian yakni tambahan penyelesaian informasi sebanyak 7 (tujuh) hari kerja. Rekapitulasi penyelesaian permohonan Informasi publik tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2. Waktu Penyelesaian Pelayanan IP PSIPKH TA 2024

Laporan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	3	2	1	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	1	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		4	2	1	1	0	0

Beranda

Profil ▾

Layanan Informasi ▾

Standar Layanan ▾

Alamat:

Sekretariat PPID

Jl. Raya Pajajaran Kav E.59 Bogor 16151

Jawa Barat, Indonesia

Hubungi:

HP & WA: 085211522622

Email:

bsp.nakeswan@pertanian.go.id

Peta Lokasi

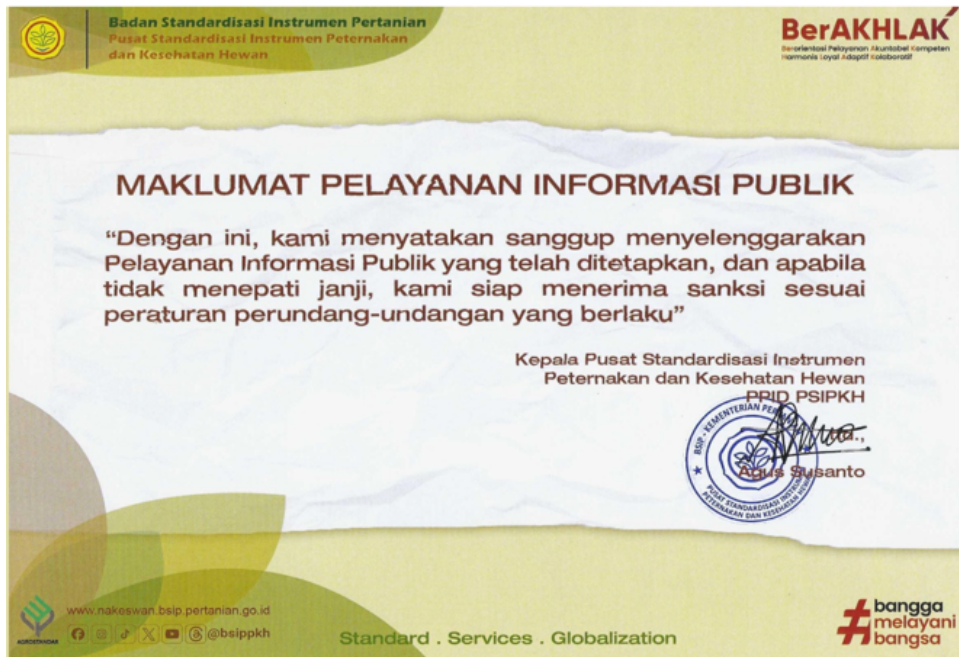
Waktu pelayanan Informasi Publik PSIPKH dilayani selama hari kerja yakni Senin - Jumat pada pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan petugas layanan informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala PSIPKH melalui Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/OT.050/H.5/01/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Jadwal Petugas Pelayanan Informasi dan Perpustakaan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.



Gambar 2. Jam Pelayanan Informasi Publik PSIPKH

Sebagai pelayanan publik, PSIPKH berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. PSIPKH memastikan setiap masyarakat dapat memperoleh layanan dengan mudah dan cepat. Komitmen ini tidak hanya menunjukkan dedikasi PSIPKH dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanian, termasuk peternakan dan kesehatan hewan didalamnya.

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) juga telah menyatakan komitmen pelayanan sesuai dengan maklumat **"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"**. Adapun maklumat tersebut juga telah diumumkan di Website PSIPKH dan Portal PPID PSIPKH dan disajikan dalam gambar 3.

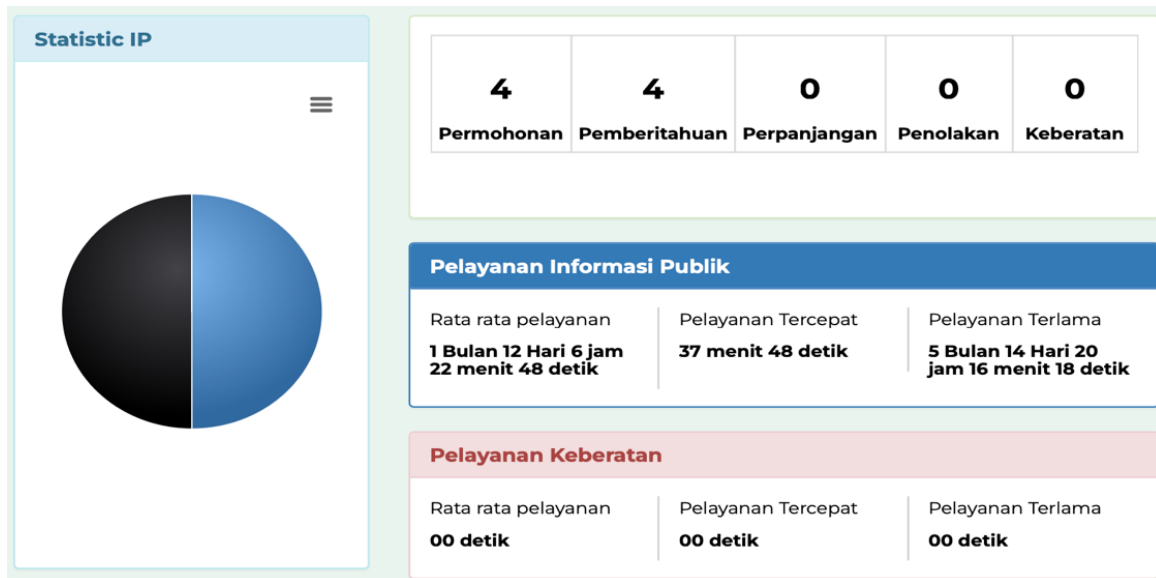


Gambar 3. Maklumat Pelayanan Informasi PSIPKH

PSIPKH mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui 1). Penyediaan Anggaran; 2). Data dan Dokumen yang Valid; 3). Sarana dan Prasarana Pendukung; 4). Sumber Daya Manusia yang Kompeten; serta 5). Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Mudah dan Transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Pelayanan yang diberikan PSIPKH kepada masyarakat antara lain pelayanan permohonan informasi, layanan perpustakaan serta layanan magang/praktek/PKL.

1.3. Rekapitulasi Pelayanan Penolakan, Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan Permohonan IP PSIPKH TA 2024

Selama Periode Januari – Desember Tahun 2024 PSIPKH, penolakan pelayanan dan permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik didapatkan hasil **NIHIL**. Hal ini merupakan indikator bahwa pemohon informasi merasa puas terhadap permohonan informasi yang telah ditindaklanjuti oleh petugas layanan dengan baik serta pemohon IP mendapatkan informasi yang dikehendaki. Berkenaan dengan hal tersebut pemohon IP telah mengisi kuisioner pelayanan dan tidak mengajukan keberatan IP. Rekapitulasi Pelayanan keberatan dan penolakan permohonan IP PSIPKH disajikan dalam gambar 4.



Gambar 4. Rekapitulasi pelayanan keberatan IP PSIPKH TA 2024

1.4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon informasi publik berdasarkan usia terkait informasi publik yang telah diterima PSIPKH selama periode Januari - Desember TA 2024 tersaji pada tabel 3. Keseluruhan pemohon IP PSIPKH telah dilayani dan diberikan informasi yang diminta dengan baik dan benar serta pemohon IP juga diwajibkan mengisi kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk penilaian dan evaluasi pelayanan publik di PSIPKH apakah telah dilaksanakan sesuai SOP atau belum yang dapat berdampak terhadap penilaian yang diberikan pemohon IP.

Tabel 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Nama Pemohon	Usia Pemohon
1.	Agus Setiawan	41 tahun
2.	Ratih Purnama	35 tahun
3.	Nopi Dwilestari	35 tahun
4.	Azzahra Siffa Rahma Putri	22 tahun

1.5. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

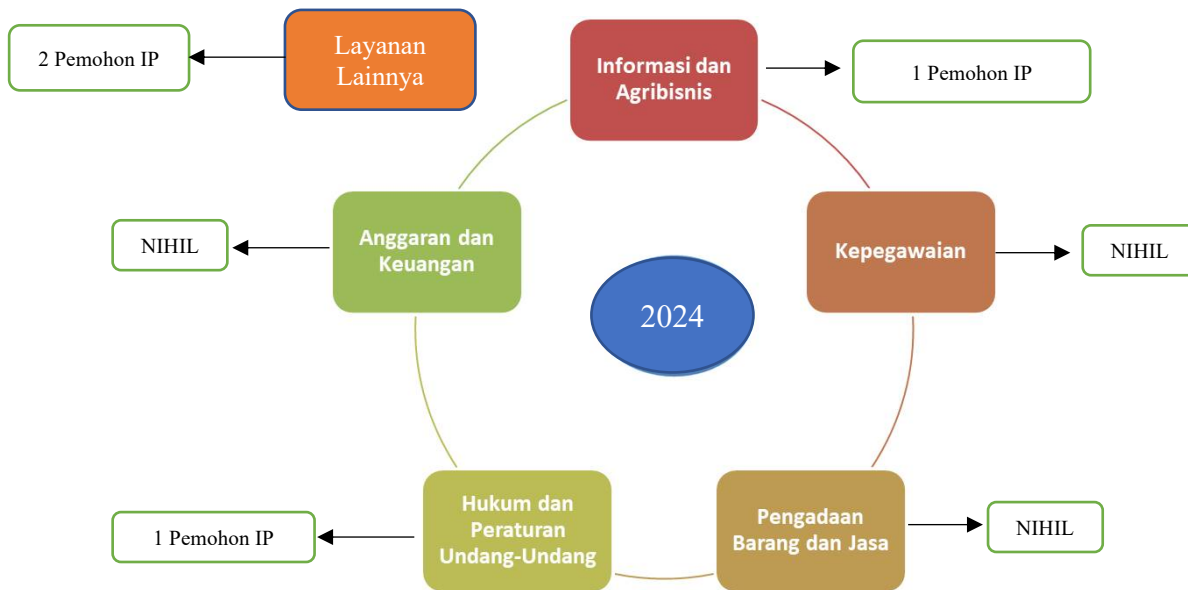
Jumlah pemohon informasi publik yang telah terdata di PSIPKH selama periode Januari - Desember Tahun 2024 berdasarkan jenis pekerjaan tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama Pemohon	Pekerjaan Pemohon
1.	Agus Setiawan	Karyawan Swasta
2.	Ratih Purnama	Pegawai Negeri Sipil
3.	Nopi Dwilestari	Karyawan Swasta
4.	Azzahra Siffa Rahma Putri	Pelajar / Mahasiswa

1.6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pengelompokan informasi Publik PSIPKH berdasarkan kategori tertinggi terdapat pada kategori informasi dan agribisnis sebanyak 2 pemohon.



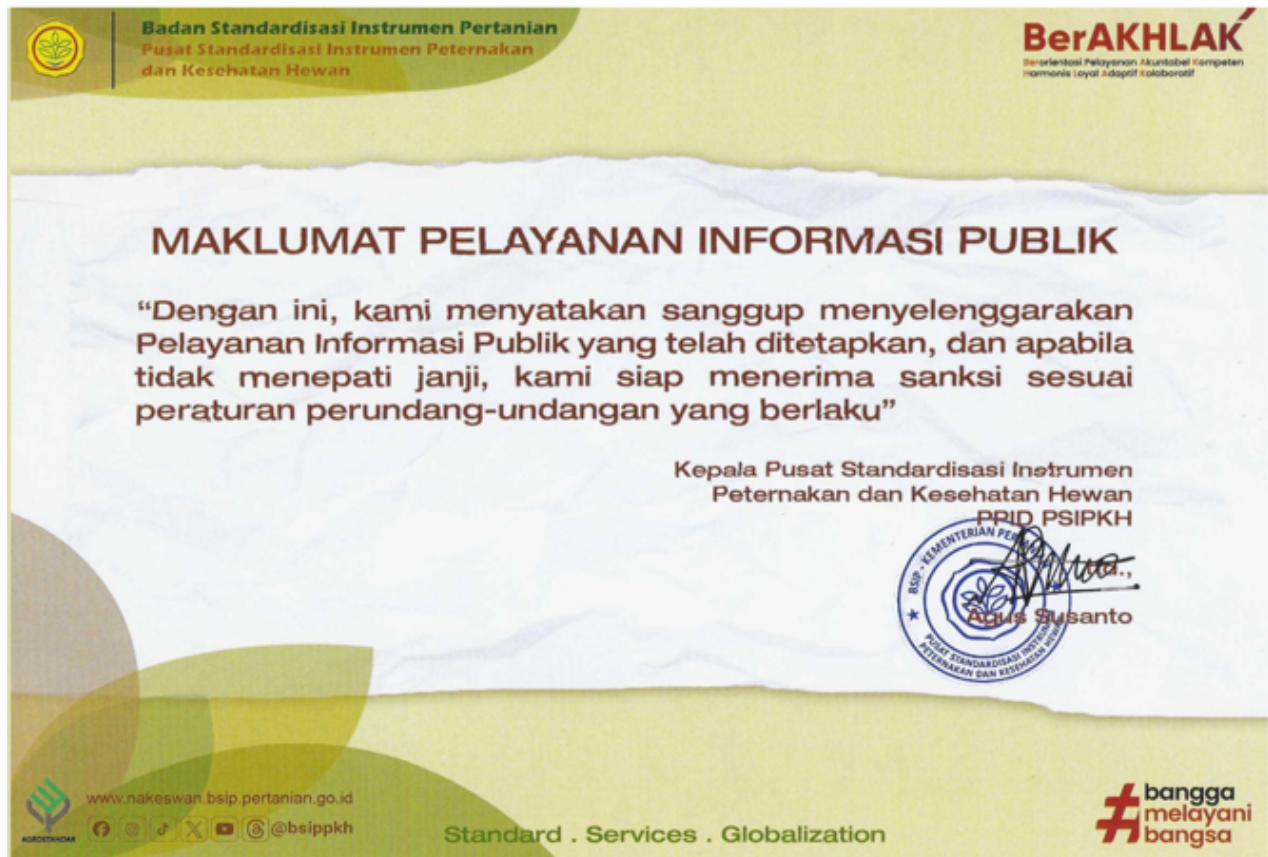
Gambar 5. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik

1.7. Motto Dan Maklumat Layanan PPID PSIPKH

Proses pelayanan informasi publik di PSIPKH telah dilaksanakan sesuai SOP dan terintegrasi antar petugas untuk pelayanan yang optimal dan prima serta mempunyai tujuan diantaranya untuk meningkatkan kemampuan petugas dengan cara bagaimana pelayanan harus diberikan.

PSIPKH memiliki Motto Pelayanan PPID **"Ternak Unggul Rakyat Makmur"** dengan harapan bahwa dengan tersampainya informasi terkait peternakan di tingkat petani peternak atau masyarakat umum dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia melalui sektor peternakan.

Maklumat PPID PSIPKH **"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**.



Gambar 6. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID PSIPKH

II. Sekilas Tentang PPID PSIPKH

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sebagai salah satu Badan Publik wajib memberikan kemudahan akses informasi sesuai UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dimaksudkan guna seluruh badan publik di bawah PSIPKH dapat menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah:

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSIPKH;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSIPKH;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I tingkat BSIP;

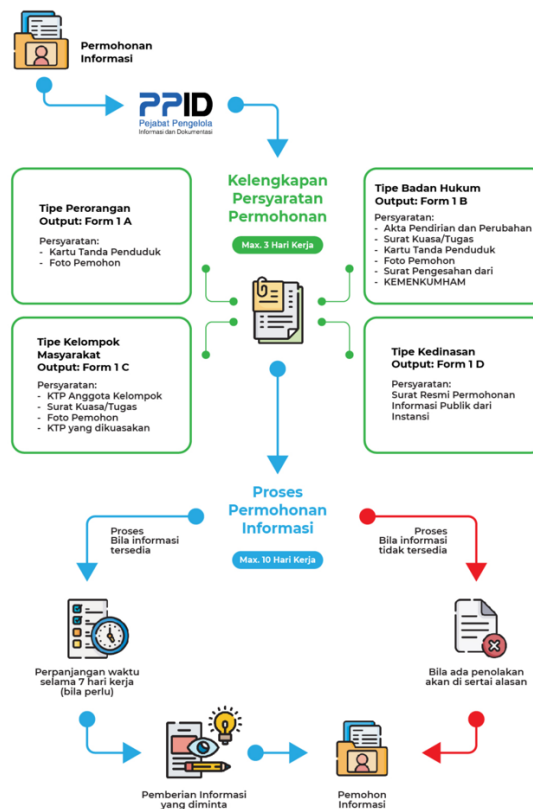
PSIPKH telah menyusun standar pelayanan Publik (SPP) Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala PSIPKH Nomor: 25.7/Kpts/HM.130/H.5/06/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilaksanakan disebabkan pada Tahun 2023, Puslitbangnak berubah nama menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dan kembali melaksanakan *public hearing* dengan mengundang seluruh satker dan stakeholder dalam mensosialisasikan tugas dan fungsi PSIPKH yang baru kepada masyarakat. Kegiatan *public hearing* dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023.



Gambar 7. Kegiatan *Public Hearing* PSIPKH

Dalam Permohonan Informasi Publik telah ditetapkan SOP/tata cara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.



Gambar 8. Alur Permohonan Informasi Publik

III. Program dan Kegiatan PPID PSIPKH 2024

Selama Periode Januari – Desember TA 2024 PSIPKH sebagai Komitmen dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

3.1. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) TA 2024

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) telah menyusun Daftar Informasi Publik TA 2024 sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024 dan telah disampaikan ke PPID Eselon II Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) pada tanggal 05 Maret 2024.

Daftar Informasi Publik (DIP) PSIPKH yang telah dibuat mencakup beberapa aspek penting diantaranya Profil PSIPKH, Program/Kegiatan tahun 2024, Kinerja PSIPKH, Aset dan Keuangan PSIPKH, Informasi publik terkait Unit Kerja, serta Informasi serta-merta. Banyak masyarakat yang tidak paham terkait kenapa informasi tersebut tidak dapat diberikan karena tergolong informasi tertutup atau informasi yang bersifat Rahasia yang artinya informasi tersebut tidak dapat diberikan ke Pemohon informasi atau dapat hanya diperlihatkan saja namun tidak boleh diperbanyak, difoto bahkan dicopy/diperbanyak oleh pemohon informasi. beberapa klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) telah disusun oleh BSIP dan Kementan dan menjadi pedoman DIK bagi Satker lingkup Kementan.

Adapun Daftar Informasi Publik yang telah disampaikan ke PPID Pelaksana Eselon II BSIP seperti tercantum pada gambar 9.

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PETERNAKAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (PSIPKH) Jl. Raya Bogor No. 12, Tanah Baru, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16911 Telp. (021) 89610000, Email: psipkh@kementan.go.id		LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKALI ATAS PELAKSANA PPID PELAKSANA DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024 TANGGAL : 05 MARET 2024		DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024		DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024																																																																																																																																																																																																																																	
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MELAYI PELAKSANA PPID PELAKSANA DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024		KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MELAYI PELAKSANA PPID PELAKSANA DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024		KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MELAYI PELAKSANA PPID PELAKSANA DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024		KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MELAYI PELAKSANA PPID PELAKSANA DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024																																																																																																																																																																																																																																	
Mengingat : a. Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menyediakan informasi publik, sesuai informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; b. Daftar Informasi Publik yang disediakan harus sesuai dengan ketentuan; c. Daftar Informasi Publik yang disediakan harus sesuai dengan ketentuan; d. Daftar Informasi Publik yang disediakan harus sesuai dengan ketentuan;		Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kemerdekaan Akses Informasi Publik (UU Kemerdekaan Akses Informasi Publik); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP No. 61 Tahun 2008); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (PP No. 54 Tahun 2008);		Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kemerdekaan Akses Informasi Publik (UU Kemerdekaan Akses Informasi Publik); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP No. 61 Tahun 2008); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (PP No. 54 Tahun 2008);		Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kemerdekaan Akses Informasi Publik (UU Kemerdekaan Akses Informasi Publik); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP No. 61 Tahun 2008); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (PP No. 54 Tahun 2008);		Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kemerdekaan Akses Informasi Publik (UU Kemerdekaan Akses Informasi Publik); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP No. 61 Tahun 2008); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (PP No. 54 Tahun 2008);																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th>Nama Informasi Publik</th><th>Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi</th><th>Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi</th><th>Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik</th><th>Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link</th><th>Retensi Arsip</th><th>Klasifikasi Dokumen</th></tr><tr><td>A. Profil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Alamat Lengkap</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>2. Visi Misi BOP</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>3. Tugas Pokok dan Fungsi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>4. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>5. Gambaran Umum Unit Kerja</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>6. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr></table>		Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	A. Profil							1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	<table><tr><th>Nama Informasi Publik</th><th>Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi</th><th>Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi</th><th>Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik</th><th>Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link</th><th>Retensi Arsip</th><th>Klasifikasi Dokumen</th></tr><tr><td>A. Profil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Alamat Lengkap</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>2. Visi Misi BOP</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>3. Tugas Pokok dan Fungsi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>4. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>5. Gambaran Umum Unit Kerja</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>6. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr></table>		Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	A. Profil							1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	<table><tr><th>Nama Informasi Publik</th><th>Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi</th><th>Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi</th><th>Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik</th><th>Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link</th><th>Retensi Arsip</th><th>Klasifikasi Dokumen</th></tr><tr><td>A. Profil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Alamat Lengkap</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>2. Visi Misi BOP</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>3. Tugas Pokok dan Fungsi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>4. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>5. Gambaran Umum Unit Kerja</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>6. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr></table>		Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	A. Profil							1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	<table><tr><th>Nama Informasi Publik</th><th>Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi</th><th>Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi</th><th>Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik</th><th>Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link</th><th>Retensi Arsip</th><th>Klasifikasi Dokumen</th></tr><tr><td>A. Profil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Alamat Lengkap</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>2. Visi Misi BOP</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>3. Tugas Pokok dan Fungsi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>4. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>5. Gambaran Umum Unit Kerja</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr><tr><td>6. Struktur Organisasi</td><td>PSIPKH</td><td>Kepala Bagian TU, Jakarta Timur</td><td>Bogor/2024</td><td>✓</td><td>Selamanya Berlaku</td><td>Berkala</td></tr></table>		Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	A. Profil							1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala	6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala
Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen																																																																																																																																																																																																																																	
A. Profil																																																																																																																																																																																																																																							
1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen																																																																																																																																																																																																																																	
A. Profil																																																																																																																																																																																																																																							
1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen																																																																																																																																																																																																																																	
A. Profil																																																																																																																																																																																																																																							
1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
Nama Informasi Publik	Pelajar/Unit /Daftar yang Mengajukan Informasi	Penerangan/Urutan /Pembuatan/ Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik Hard Copy / Soft Copy / Link	Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen																																																																																																																																																																																																																																	
A. Profil																																																																																																																																																																																																																																							
1. Alamat Lengkap	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
2. Visi Misi BOP	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
3. Tugas Pokok dan Fungsi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
4. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
5. Gambaran Umum Unit Kerja	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	
6. Struktur Organisasi	PSIPKH	Kepala Bagian TU, Jakarta Timur	Bogor/2024	✓	Selamanya Berlaku	Berkala																																																																																																																																																																																																																																	

Gambar 9. Penyampaian Daftar Informasi Publik PSIPKH Tahun 2024

3.2. Penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH kepada masyarakat

Berpedoman kepada UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, Badan Publik wajib untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sebagai Unit Kerja Kementerian Pertanian berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmennya, PSIPKH bersama UPT Lingkup PSIPKH melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik via *zoom meeting dan onsite* di Ruang Rapat Calliandra PSIPKH.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si selaku atasan langsung PPID PSIPKH dan diikuti penandatanganan komitmen oleh pejabat struktural lainnya dan tim PPID PSIPKH. Selain itu dilakukan juga penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) PSIPKH TA 2024. Penandatanganan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Diharapkan PSIPKH dan UPT Lingkup PSIPKH mampu menjadi instansi yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta bertanggung jawab.



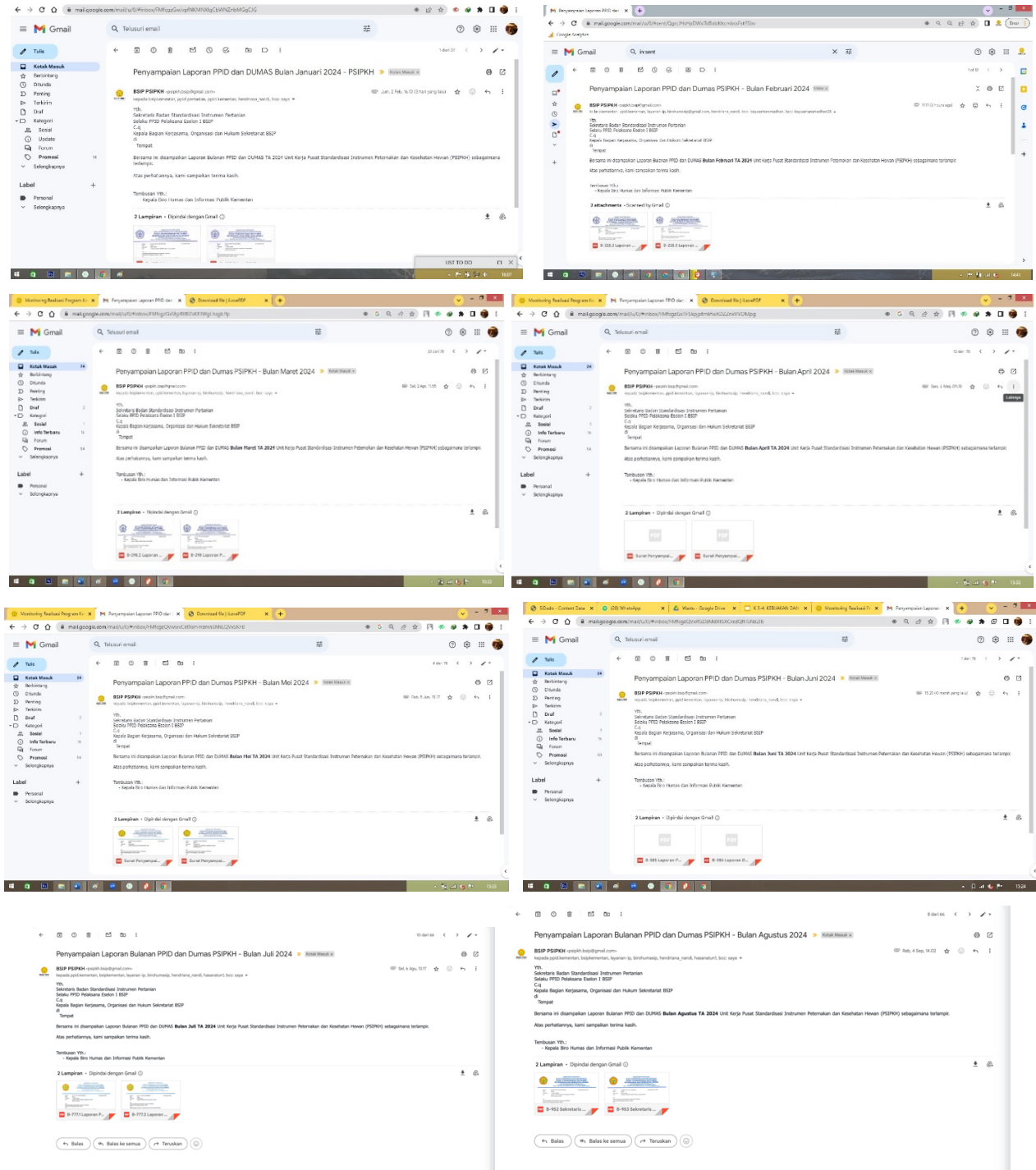
Gambar 10. Penandatanganan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Keterbukaan Informasi Publik

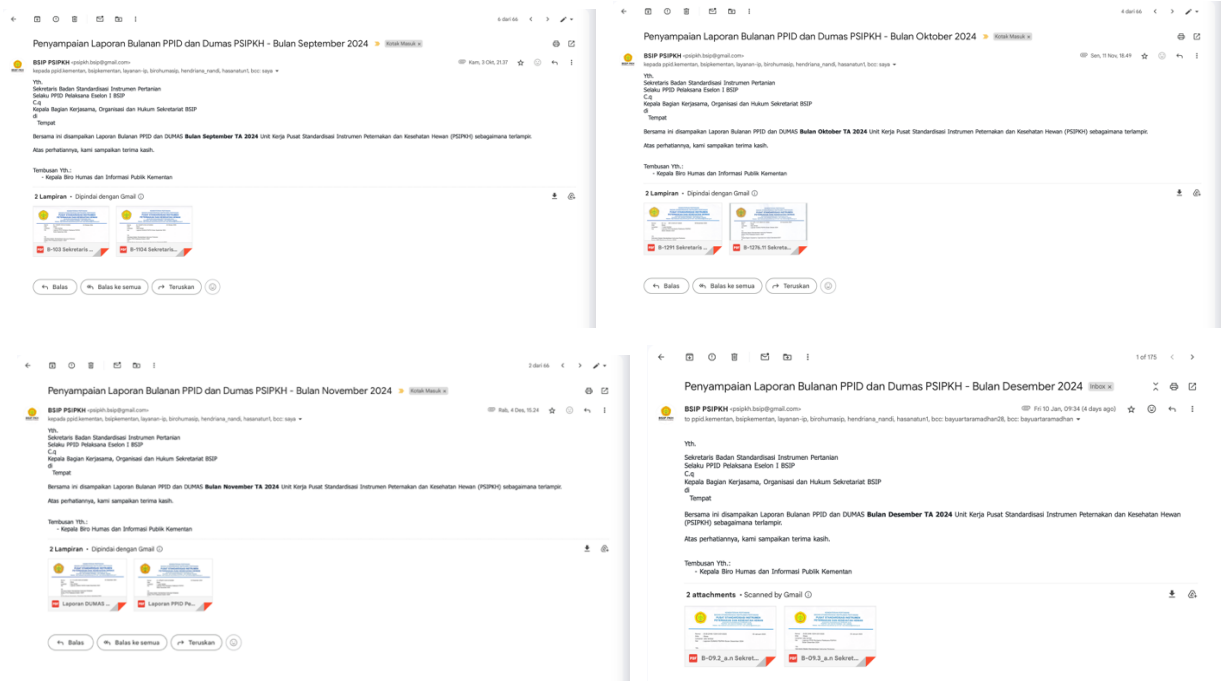
3.3. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas PSIPKH 2024

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) melakukan rekapitulasi dan penyusunan laporan bulanan PPID dan Dumas TA 2024. Laporan tersebut melaporkan jumlah pemohon informasi yang masuk ke PSIPKH setiap bulannya. Periode Januari – Desember sebanyak 4 (empat) permohonan informasi. Hal ini menindaklanjuti surat dari Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Nomor B-244/HM.130/H.1/01/2024 tanggal 26

Januari 2024 hal Pemenuhan Kewajiban PPID Lingkup BSIP Tahun 2024 yang tercantum pada poin 3 yang dijelaskan bahwa Pejabat dan petugas PPID dapat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan dan secara berkala menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan PPID ke Sekretariat Utama BSIP dan PPID Utama Kementan.

Penyampaian laporan bulanan PPID dan Dumas PSIPKH bulan Januari – Desember Tahun 2024 telah dilaksanakan dan dikirim menggunakan email PSIPKH dikirimkan ke email BSIP dan email PPID Utama dengan ditembuskan kepada Ketua Kelompok PHSI dan Ketua Tim Kerja PHSI PSIPKH. Adapun penyampaian tersebut terlampir pada gambar 11.





Gambar 11. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas Januari – Desember 2024

3.4. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

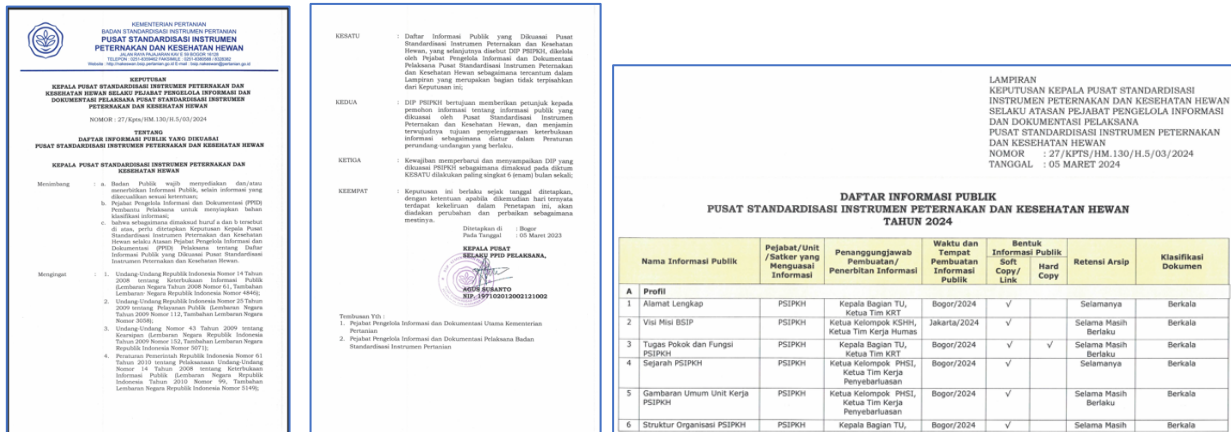
Dokumen terkait informasi publik Puslitbangnak dimulai tahun 2017 dan telah di perbaharui oleh PSIPKH tahun 2024 serta telah dikumpulkan dan sudah dilaksanakan *public hearing*. Dokumen-dokumen tersebut sudah disampaikan dan diupload di dalam website PSIPKH serta portal PPID PSIPKH dengan beberapa informasi yang telah dicantumkan antara lain:

1. Kebijakan strategis: Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama dan renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019; 2020-2024;
2. LAKIP 2024,2023,2022,2021,2020,2019, 2018,2017;
3. Laporan Tahunan PSIPKH 2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017;
4. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017
5. Laporan Tahunan PPID dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) 2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017
6. Laporan Keuangan dan Aset PSIPKH 2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017

3.5. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 27/Kpts/HM.130/H.5/03/2024, PSIPKH telah menyusun dan mengesahkan daftar informasi publik (DIP) tahun 2024. Kegiatan ini menyusun seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon informasi dari masing-masing bagian tim kerja di PSIPKH.

Beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi ketua kelompok atau tim kerja lain di PSIPKH, seperti misalnya: Ikhtisar Laporan Keuangan Audited yang sudah diserahkan BPK kepada DPR-RI, dimana didalamnya mencantumkan minimal informasi mengenai Rencana dan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan Daftar asset dan investasi. Informasi tersebut diwajibkan diupdate secara berkala atau minimal 6 bulan sekali yakni RKAKL/DIPA; SAKIP/LAKIP/RENSTRA; RKT, PK, IKU; dan Laporan dan akses informasi publik.



Gambar 12. SK Penetapan DIP PSIPKH 2024

3.6. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Diharapkan seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup PSIPKH dapat berfungsi dengan baik dan perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai serta anggaran. Dengan demikian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah belum semua pejabat/ aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan terkait informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon perlu disosialisasikan secara terus menerus.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah staf dan pejabat dari di lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

IV. Kegiatan PPID PSIPKH TA 2024

4.1. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan IP PSIPKH TA 2024

Sesuai Amanat Undang - Undang Dasar 1945 Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang - Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) berinisiasi melaksanakan kegiatan penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik, Penandatanganan Pakta Integritas serta Penandatanganan Zona Integritas Tahun 2024 sebagai bentuk Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai PSIPKH dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya murah dan cara sederhana. Kegiatan penandatanganan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik, Pakta Integritas dan Pencanangan Zona Integritas Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) TA 2024 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di ruang Calliandra.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Kepala PSIPKH, Kepala Tata Usaha yang juga Pejabat Pembuat Komitmen PSIPKH, koordinator dan sub koordinator serta penanggung jawab kegiatan lingkup PSIPKH, Perwakilan pejabat fungsional tertentu, pejabat administrasi umum, Pengelola keuangan dan Petugas PPID PSIPKH. Dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PSIPKH dan dilaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas (Z.I) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH).

Pencanangan Zona Integritas (Z.I) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) disahkan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) disaksikan oleh seluruh pegawai PSIPKH. Setelah kegiatan Penandatanganan ini dilanjutkan dengan Penyampaian Materi Pentingnya Integritas dan Komitmen Pegawai dalam Peningkatan Kinerja Organisasi PSI-PKH oleh Bapak Aris Setiawan. Kegiatan Penandatanganan ini diikuti oleh seluruh pegawai PSIPKH serta UPT PSIPKH melalui zoom meeting.

Kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan ini antara lain Seluruh PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT wajib untuk menyusun Daftar Informasi Publik yang dikuasai dan disampaikan kepada PPID Eselon I dan ditembuskan kepada PPID Utama. Seluruh PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT wajib untuk membuat laporan bulanan dan disampaikan secara rutin per bulan kepada PPID Eselon I dan ditembuskan kepada PPID Utama serta Seluruh PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT wajib untuk menyusun laporan tahunan dan dikirimkan kepada PPID Eselon I dan ditembuskan kepada PPID Utama.



Gambar 13. Penandatanganan Komitmen Bersama PPID PSIPKH TA 2024

4.2. Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSIPKH

Rapat Koordinasi PPID di Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Februari 2024 yang diikuti secara *hybrid* sesuai dengan surat undangan Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSIPKH Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Nomor B-143/HM.140/H.5/02/2024 tanggal 5 Februari 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi PPID di Lingkup PSIPKH dilakukan secara *hybrid* menggunakan *zoom meeting* dan *luring*. Kegiatan luring dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Tya Tirtasari, PPID Utama Kementan Erwin Zulkarnaen, Wahyu Indarto, Mufrida, PPID Eselon I Sekretariat BSIP Intan Yudia Nirmala, Yanuar Budi Haristo, Amalia Gillyastuti Sudarso serta perwakilan satker Lingkup PSIPKH antara lain tim PPID BPSI UAT, Tim PPID BBPSI Veteriner, dan Tim PPID LPSI Ruminansia Besar dan Tim PPID LPSI Ruminansia Kecil secara online.

Rapat dibuka dengan Sambutan dari Kepala Bagian Tata Usaha (Ir. Narta, M.Si). Dalam sambutannya, beliau menyampaikan PSIPKH berkomitmen dalam hal transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi serta pembenahan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik. Selain itu, setiap pegawai BSIP harus meningkat dengan mengubah mindset dari lembaga penelitian menjadi lembaga pelayanan. Perubahan mindset tersebut berbuah perubahan budaya kerja. Pegawai BSIP dituntut memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil SIPKH Nandi Hendriana, S.T.,M.Kom dengan menyampaikan *Curriculum Vitae* Narasumber KIP Tya Tirtasari. Paparan pertama disampaikan Tya Tirtasari dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Publik. Materi yang disampaikan terkait Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik serta Kerangka Hukum KIP di Indonesia. Setiap tahun disebutkan oleh Tya bahwa ada lembaga mandiri yang melaporkan agenda Keterbukaan Informasi Publik kepada presiden. Monev ini dilakukan kepada badan publik yang kategorinya sesuai undang-undang di seluruh Indonesia. Kategori Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif. Apabila badan publik sudah informasi, artinya badan publik tersebut sudah dinilai paham dan taat menjalankan mandat dari UU No. 14 Tahun 2008 serta Pasal 28 f UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi.

Dalam Undang - Undang Dasar 1945 tidak diatur mengenai siapa yg berhak memperoleh informasi. yang disyaratkan hanya WNI. Sehingga, agar tertib administrasi, seluruh permohonan informasi publik agar diproses melalui SILAYAN Online pada portal PPID PSIPKH. Masyarakat yang berhak memperoleh informasi yakni orang, kelo pok orang, Badan hukum, badan hukum lainnya, wartawan dan NGO/LSM. Adapun jenis informasi dalam UU KIP dibedakan menjadi 3 jenis yakni informasi berkala, Informasi serta merta, Informasi Setiap saat serta Informasi yang dikecualikan. Informasi Publik yang wajib dibuka yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Paparan kedua disampaikan oleh Wahyu Indarto dan Mufrida selaku Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dalam paparan tersebut disampaikan beberapa point

diantaranya hasil penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) Lingkup PSIPKH Tahun 2023. Penilaian SAQ ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan kepatuhan badan publik dalam menyampaikan informasi yang ada baik melalui website maupun medsos untuk diketahui oleh masyarakat umum. Beberapa catatan Hasil penilaian tersebut diantaranya Unit Kerja BBPSI Veteriner bahwa medsos harus rutin di posting dan kontinyu, dorongan keikutsertaan dan komitmen pimpinan mendukung keterbukaan IP, serta perlu dipermudah akses masyarakat kedalam website. Unit Kerja BPSI UAT didapatkan hasil penilaian BPSI UAT didapatkan hasil penilaian BPSI UAT medsosnya kurang informatif, admin kurang responsif serta akun portal PPID tidak ada evidencenya, Kehadiran dan komitmen pimpinan kurang serta beberapa dokumen PPID seperti SK DIP, Dokumen PBJ tidak tercantum didalam evidence SAQ. LPSI Ruminansia Besar didapatkan beberapa catatan penilaian diantaranya belum rutinnya postingan di dalam medsosnya, beberapa dokumen yang diminta dalam evidence SAQ juga tidak tersedia seperti Surat undangan kegiatan, notulen, daftar hadir, dokumen DIPA, POK dll tidak diupload dalam form penilaian SAQ. dan Unit Kerja LPSI Ruminansia Kecil didapatkan beberapa catatan yakni youtube dan medsos tidak aktif serta beberapa informasi berkala dan serta merta juga belum ada serta perlu penyempurnaan website.



Gambar 14. Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSIPKH

4.3. Pembinaan PPID PSIPKH ke PPID BPSI UAT

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSIPKH yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 15 Februari 2024 di Aula Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tim PPID PSIPKH yang terdiri dari Hasanatun Hasinah, S.Pt., MP, Nandi Hendriana, S.T., M.Kom dan Bayu Arta Ramadhan, S.Pt melaksanakan kegiatan pendampingan PPID ke BPSI Unggas dan Aneka Ternak Ciawi. Kegiatan rapat dibuka oleh Kepala BPSI UAT, Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si., dan dipandu oleh Bapak Dadang Sudarman, S.Kom., selaku Kasubag TU BPSI UAT. Pada kesempatan tersebut kepala BPSI UAT memberikan arahan diantaranya Pada tahun 2022 nilai PPID BPSI UAT sudah mencapai informatif namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi menuju informatif, yang disebabkan kurang lengkap dan tepatnya dalam memberikan evidence pada poin-poin PPID yang dinilai. Rapat koordinasi ini merupakan proses evaluasi dan perbaikan PPID BPSI UAT pada tahun 2023. Harapan Balai bahwa hasil rapat dapat menjadi petunjuk/pedoman untuk meningkatkan nilai PPID tahun 2024, salah satunya dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dengan tepat dan akurat.

Beberapa catatan yang menjadi perhatian pada Rapat koordinasi PPID BPSI UAT antara lain Self Assessment Questionnaire (SAQ) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik BPSI UAT sangat penting untuk dilengkapi/disempurnakan karena 80% hasil penilaian berasal dari SAQ (Lampiran 2). Secara umum, kekurangan SAQ BPSI UAT Tahun 2023 adalah pada pencantuman evidence yang kurang jelas dan tidak sesuai yang dibutuhkan. Beberapa catatan terkait SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik BPSI UAT Tahun 2023 antara lain 1). Poin A.I.1.a. Ketersediaan informasi pada Youtube UK/UPT masih kurang (minimal 2 video setiap bulan). Hal yang dapat dilakukan diantaranya merepost berita/video yang ditampilkan di Facebook dan Instagram, atau melink.kan dengan video di TikTok BPSIUAT. Hal yang menjadi kendala dalam mengupload video dalam Youtube adalah copyright back sound yang digunakan. Terkait hal ini, tim pengelola Youtube BPSI UAT harap berkoordinasi dengan PSIPKH (Indra) untuk berdiskusi mengatasi kendala tersebut; 2). Bahan untuk video pada Youtube, Instagram maupun Facebook dapat berupa produk ternak BPSI UAT, baik terkait keunggulan produk, manajemen pemeliharaan, pakan, reproduksi dan lain-lain; 3). Poin A.I.1.b-c. Ketersedian informasi pada Facebook dan Instagram adalah minimal 10 postingan setiap bulan. Sementara pada tahun 2023, jumlah post di Facebook dan Instagram masih kurang dari jumlah tersebut; 4). Poin A.I.2. Layanan informasi publik UK/UPT: evidence yang dicantumkan tidak sesuai, serta tidak lengkap. Hal yang dapat dilakukan untuk melengkapi evidence pada poin ini adalah dengan men-screen shot akun petugas PPID di portal PPID BPSI UAT; 5). Poin A.II.1-3. Layanan Non Elektronik: Informasi evidence perlu ditambahkan/dilengkapi; 6). Poin B.8. Kehadiran pimpinan UK/UPT dalam kegiatan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023: perlu dilengkapi foto kegiatan atau screeshot kegiatan daring/online; 7). Poin C.I.1.b. Dasar hukum

pendirian yang mengatur pembentukan UK/UPT (SK Permentan Pembentukan Organisasi): tidak ada bukti evidence berupa screen shot dan narasi/informasi di website.

Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa perlu dilaksanakan beberapa perbaikan diantaranya perbaikan website BPSI UAT, Kemudahan dan keamanan dalam penelusuran informasi di website BPSI UAT, perbaikan tata kelola website, perlu inovasi terbaru dalam layanan informasi serta perlu keaktifan pengelola kontak layanan pada website BPSI UAT.



Gambar 15. Pendampingan PPID BPSI UAT

4.4. Sosialisasi Monev Keterbukaan IP Lingkup Kementan

Kementerian Pertanian melalui Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementan melaksanakan Bimbingan Teknis dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian TA 2024. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat dan petugas PPID baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT, maupun PPID Pembantu Pelaksana. PSIPKH selaku PPID Pembantu Pelaksana ikut hadir Kepala PSIPKH Dr.drh. Agus Susanto, M.Si, Ketua Kelompok PHSI, Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil, serta petugas PPID Bayu Arta Ramadhan, S.Pt dan tim PPID PSIPKH Dinda Akhlaqluhusna, S.Pt dan Febri Mundani, A.Md.

Kegiatan dilakukan secara hybrid (online dan offline). Rapat dimoderatori oleh Wahyu Indarto dan Acara dibuka oleh Kepala Biro Humas Kuntoro Boga Andri S.P, M. Agr.Ph.D

menyampaikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik perlu dilakukan update informasi publik pada website masing-masing unit kerja serta kegiatan monev dilakukan seperti biasa menggunakan SAQ namun untuk kegiatan visitasi unit kerja yang masuk kedalam nominasi informatif akan dilakukan dengan menggunakan video pendek yang memuat informasi sarana prasarana, pelaksanaan layanan informasi publik, dan juga pengelolaan dokumen informasi publik yang akan dinilai oleh PPID Utama sebelum kegiatan wawancara.

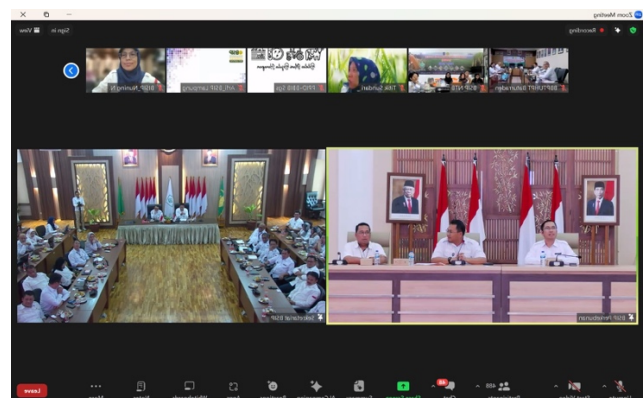
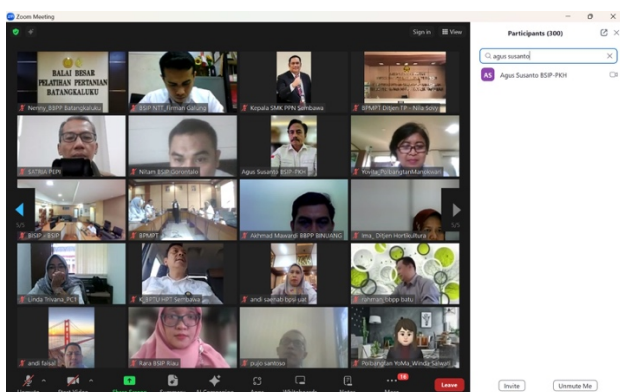
Dalam mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023, seluruh unit kerja diharapkan juga mengumumkan dan menyampaikan informasi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa di menu website maupun di portal PPID unit kerja sebagai evidence penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Wawancara Pimpinan dilakukan untuk menilai Inovasi, strategi dan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan instansinya.

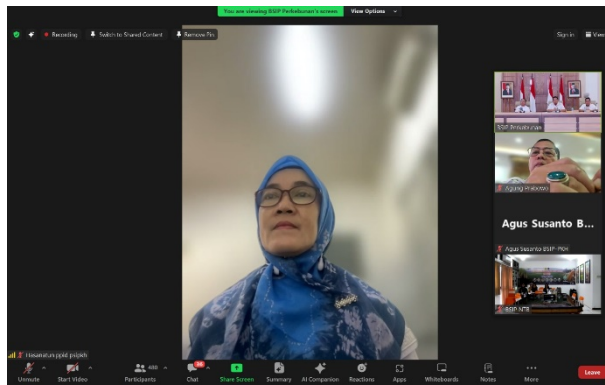
Timeline monev KIP dimulai tanggal 01 – 22 Juli 2024 (selama 3 minggu jangka waktu pengisian) dengan pengisian SAQ oleh PPID UK/UPT. Tanggal 23 Juli – 2 Agustus 2024 dilakukan verifikasi SAQ dan Penilaian website. Selanjutnya dilakukan validasi standar layanan IP dengan pembuatan video tanggal 8 – 16 Agustus 2024. Dilanjutkan dengan kegiatan wawancara dan presentasi pimpinan dan presentasi petugas PPID dilakukan pada minggu ke 3 Agustus 2024 serta pada bulan November 2024 dilakukan penganugerahan lingkup Kementan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi pengisian SAQ diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana, komitmen organisasi, jenis informasi serta penilaian pengisian website UK/UPT. Dokumen yang diwajibkan diunggah pada website masing-masing UK/UPT yakni daftar informasi setiap saat sesuai Perki SLIP 2021 antara lain: Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan UK/UPT; Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; Surat menyurat pimpinan atau pejabat UK/UPT dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan peneraan izin yang diberikan; Data perbendaharaan atau inventaris; Rencana strategis Kementan/ Unit Kerja Eselon I dan rencana kerja UK/UPT; Agenda kerja pimpinan; Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya; Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau

penyelesaian sengketa; serta Informasi tentang standar pengumuman Informasi. Informasi setiap saat yang wajib disampaikan hanya rekapitulasi daftar nama dokumennya saja tanpa lampiran dokumen keseluruhannya.

Hasil dan Tindak lanjut Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian antara lain; Perlu komitmen pimpinan seluruh Unit Kerja Lingkup Kementan dalam Pengelolaan PPID; PPID UK/UPT wajib melaksanakan pengelolaan informasi publik secara proaktif, efektif dan transparan sesuai aturan perundangan yang berlaku; Semua dokumen informasi publik yang sifatnya terbuka agar dapat diunggah di Portal PPID; Seluruh PPID Pelaksana Eselon I serta PPID Pembantu Pelaksana wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditandatangani oleh PPID Pelaksana di masing-masing unit kerja serta diketahui oleh Kepala Unit Kerja masing-masing; Perlu disusun Daftar Informasi Publik (DIP) TA 2024 dalam satu tahun; Kelengkapan regulasi PPID perlu dibuat termasuk SK Tim PPID, dan SK Petugas Layanan PPID; Perlu dibentuk Tim PPID yang beranggotakan dari masing-masing bagian (KSPHP, PE dan TU) untuk berkomitmen dalam mensuplai data yang diperlukan dalam penyusunan dan pengisian DIP; Dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik, seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian wajib mengalokasikan anggaran sesuai instruksi Sekretaris Jenderal Kementan No B-2928/RC.110/A/07/2018 tentang Penyediaan ALokasi Anggaran Dana untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; Sarana dan prasarana di tiap PPID UK/UPT perlu disediakan untuk menunjang pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang prima diantaranya petunjuk arah ruang layanan ppid, jalur evakuasi, titik kumpul, sarana ramah disabilitas, jalur kursi roda, panduan informasi dalam bentuk huruf braille atau suara, ruang laktasi dan konter layanan atau ruang konsultasi PPID serta Ruang konter layanan informasi publik di tiap Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis wajib tersedia meja dan kursi layanan informasi publik, kursi tunggu, printer dan scanner, komputer dan koneksi internet, kotak saran, formulir layanan informasi publik serta informasi pendukung lainnya dalam melayani permohonan informasi publik secara on visit.



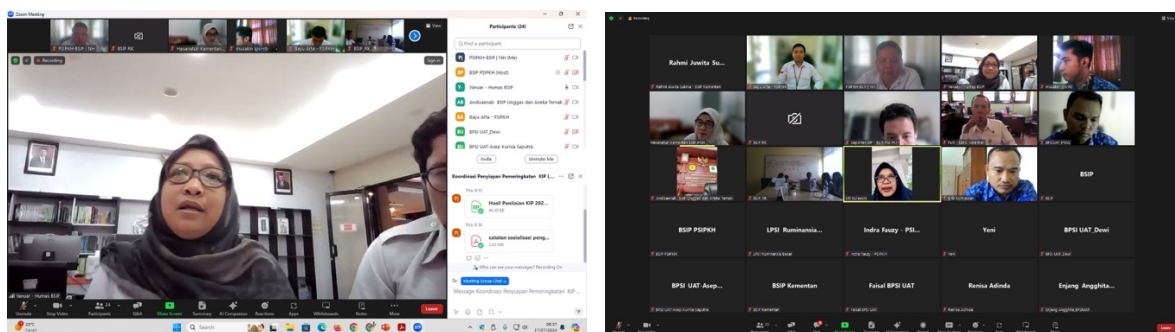


Gambar 16. Sosialisasi Monev Keterbukaan IP TA 2024

4.5. Koordinasi Pengisian SAQ TA 2024

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Ketua Tim Kerja KSHOH BSIP Intan Yudia Nirmalasari beserta tim melaksanakan kegiatan Koordinasi PPID Lingkup BSIP. Kegiatan dilaksanakan secara zoom meeting (online) dengan mengundang seluruh PPID Lingkup BSIP pada Rabu tanggal 17 Juli 2024. Hadir dalam acara tersebut, tim PPID PSIPKH Hasanatun Hasinah, Nandi Hendriana, Sepdrian Dwikirana Putra, M Indra Fauzy dan Bayu Arta Ramadhan.

Kegiatan rapat koordinasi dibuka oleh Intan Yudia Nirmala dengan menyampaikan beberapa hal yakni terkait pengisian SAQ TA 2024 Lingkup BSIP. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yakni pemenuhan evidence terkait regulasi PPID, prosedur layanan informasi PSIPKH serta beberapa evidence lainnya perlu ditindaklanjuti dengan di upload pada Google drive yang telah disediakan oleh Kementan. Selain itu perlu juga dilakukan perbaikan dan maintenance website.

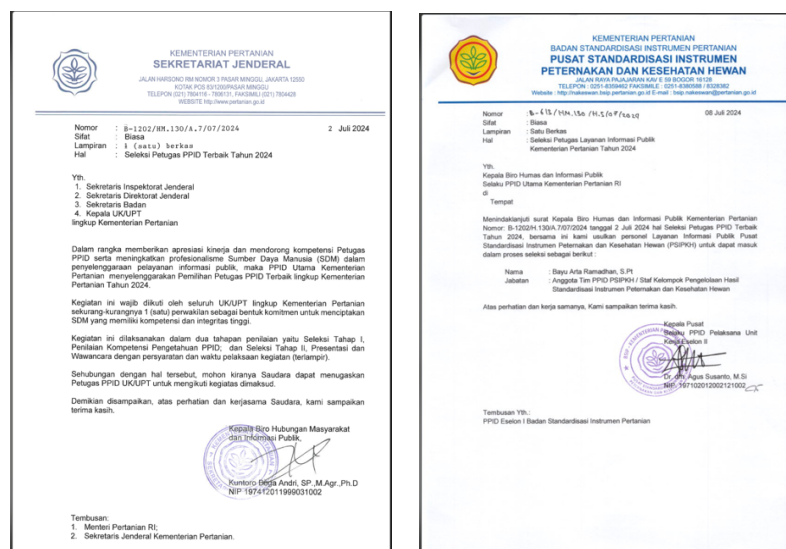


Gambar 17. Koordinasi Pengisian SAQ

4.6. Seleksi Petugas PPID Terbaik Tahun 2024 Lingkup Kementan

Dalam rangka memberikan apresiasi kinerja dan mendorong kompetensi Petugas PPID serta meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Utama Kementerian Pertanian menyelenggarakan Pemilihan Petugas PPID Terbaik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 sesuai Surat Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Nomor B-1202/HM.130/A.7/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 hal Seleksi petugas PPID terbaik tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim PPID PSIPKH berkesempatan mengikuti kegiatan seleksi tersebut melalui surat Kepala PSIPKH Nomor B-613/HM.130/H.5/07/2024 mengusulkan personel layanan informasi publik PSIPK A/n Bayu Arta Ramadhan, S.Pt. Kegiatan seleksi ini dilaksanakan dalam dua tahapan penilaian yaitu Seleksi Tahap I, Penilaian Kompetensi Pengetahuan PPID; dan Seleksi Tahap II, Presentasi dan Wawancara dengan persyaratan dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah ditentukan PPID Kementan. Timeline kegiatannya dilaksanakan pendaftaran peserta pada minggu keempat juli, seleksi tahap pertama pada minggu pertama Agustus, seleksi tahap kedua pada minggu kedua agustus dan penganugerahan petugas terbaik pada minggu pertama September 2024.



Gambar 18. Keikutsertaan Seleksi Petugas PPID Terbaik 2024

4.7. Konsultasi PPID PSIPK ke PPID Utama Terkait Pengisian SAQ TA 2024

Tim PPID PSIPKH yang diwakili oleh Bayu Arta Ramadhan, S.Pt dan Dinda Akhlaqulhusna, S.Pt berkesempatan mengunjungi PPID Utama Kementan pada Kamis, 18 Juli 2024. Adapun agenda kegiatan tersebut yakni konsultasi terkait pengisian SAQ PSIPH TA 2024, Konsultasi SIDADO PSIPKH dan Konsultasi dalam penderasan informasi publik lingkup PSIPKH. Adapun selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan dalam mengikuti pemeringkatan petugas PPID terbaik serta Pengusulan username dan password baru petugas layanan Informasi PSIPKH.

Kegiatan diterima oleh Muchril Azwar selaku koordinator PIP Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. kegiatan konsultasi ini menitikberatkan pada bagaimana cara menyusun evidence SAQ yang baik dan benar serta cara penyampaian. Selain itu juga dijelaskan runutan cara menjawab SAQ dengan evidence yang dikehendaki serta alamat link evidence tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga ditanyakan terkait bagaimana kiat-kiat dalam kegiatan wawancara KIP serta tips dan trik dalam menjawab wawancara tersebut. Kegiatan ditutup dengan evaluasi cara menjawab SAQ yang disampaikan oleh Muchril Azwar dan Mufrida selaku Liason Officer PPID Lingkup BSIP.



Gambar 19. Konsultasi PPID PSIPKH ke PPID Utama Kementan

4.8. Wawancara Keterbukaan IP Tahap II Lingkup Kementan

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan hewan (PSIPKH) masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dan berkesempatan untuk dapat mengikuti Wawancara Keterbukaan Informasi Publik Tahap II yang dilakukan oleh Biro Humas Kementan bersama dengan Tim Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai surat undangan Nomor B-1601/HM.130/A.7/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024. Kegiatan wawancara lingkup BSIP dilaksanakan di ruang rapat Kementan pada tanggal 05 September 2024. Adapun tim PSIPKH yang hadir diwakili oleh Kepala Pusat PSIPKH (online), Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Kelompok PHSI, Ketua Tim Kerja PHSI dan Petugas PPID PSIPKH hadir secara offline.

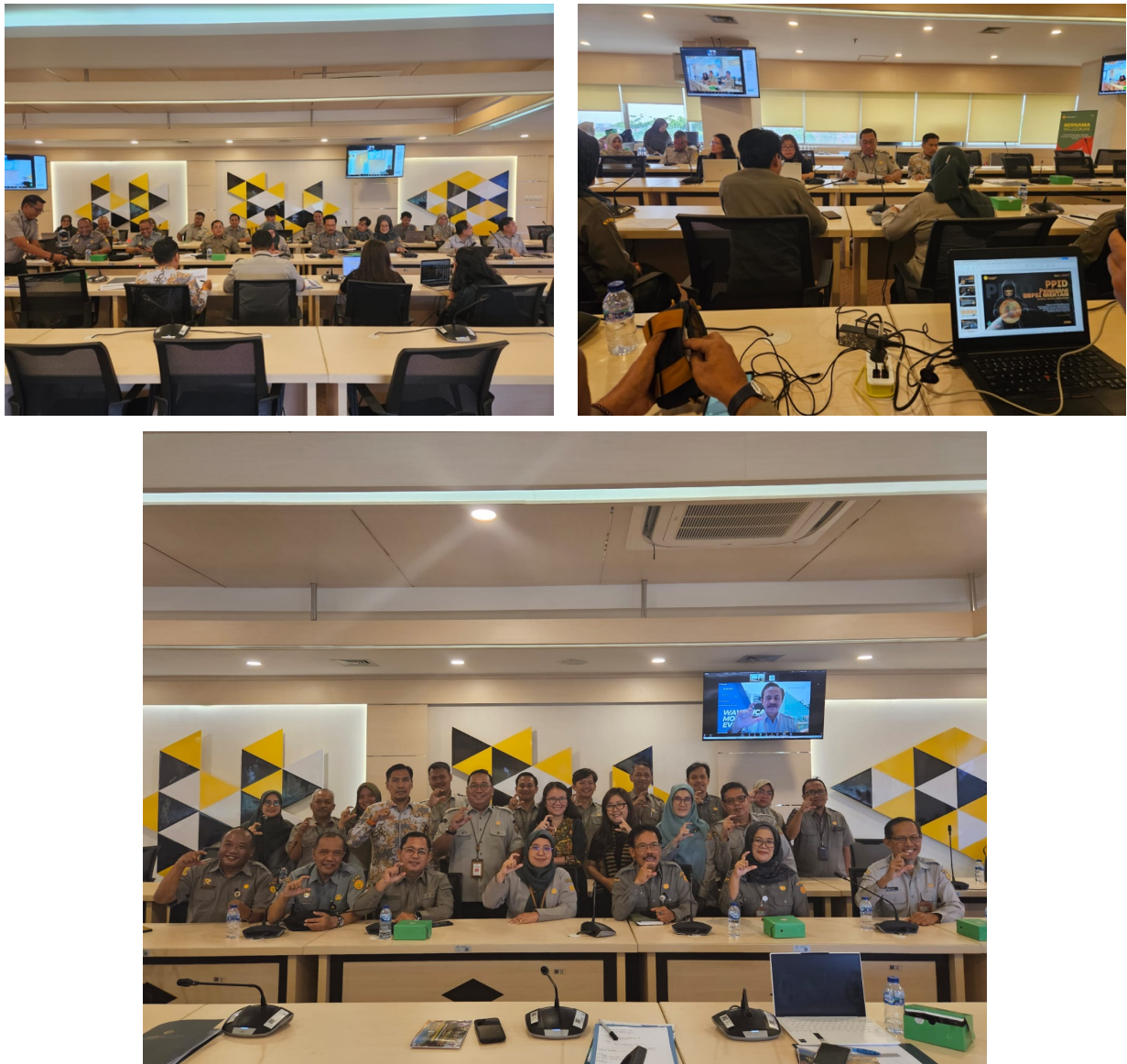
Kegiatan dibuka oleh Biro Humas dan IP Kementan Wahyu Indarto yang dalam pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara atau metode untuk mendorong seluruh UK/UPT Lingkup Kementan agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan publik di masing-masing unit kerja secara prima dan maksimal. Saat ini publik sudah sangat kritis dan melek terkait pelayanan publik yang ada di Indonesia sehingga diharapkan seluruh baik petugas maupun pejabat ppid melayani seluruh masyarakat yang datang memohon informasi maupun informasi publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2017 bahwa Informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik kepada pemohon, kecuali beberapa informasi tertentu.

Hadir dalam kegiatan tersebut tim Juri Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yakni Cecep Suryadi, Astrid Debora dan Annie Londa. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan tim juri diantaranya 1). siapa user/masyarakat dari aktifitas dari Unit kerja masing-masing; 2). Bagaimana upaya dalam menderaskan informasi dan menyampaikan informasi dalam menyampaikan informasi proiritas Kementan. Indikator apa yang menyatakan bahwa informasi itu sudah tersampaikan ke masyarakat; 3). Kolaborasi dengan dunia internasional perlu disampaikan kepada publik serta pengaruhnya terkait perkembangan di Indonesia; 4). Program 3 prioritas Strategis (Pompanisasi, PAT dan Optimalisasi Lahan) apakah sudah sampai dan terdengar informasinya di masyarakat; serta 5). Bagaimana 3 prioritas tersebut relate dengan tusi kegiatan sehari-hari.

Menindaklanjuti beberapa point pertanyaan tersebut, PSIPKH menjawab yang berhubungan langsung dengan Tusi PSIPKH yakni PSIPKH saat ini telah menerima user/masyarakat dalam kegiatan Magang, kunjungan maupun kerjasama antara pemerintah, universitas maupun stakeholder terkait terkait Peternakan dan kesehatan Hewan; dan Kolaborasi PSIPKH di dunia Internasioanl sudah dilakukan yakni telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan FAO bahwa PSIPKH sebagai mirror commitee atau sekretarian CODEX Allimentrius CCRVDF.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan konklusi wawancara dan dilanjutkan dengan foto bersama oleh Tim PPID Kementan, Tim Juri KIP serta seluruh tim PPID lingkup Kementan baik yang hadir secara Online maupun Offline.





Gambar 20. Wawancara Keterbukaan IP Tahap II Kementan

4.9. Malam Penganugerahan Keterbukaan IP Tahun 2024

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) yang diwakili oleh Hasanatun Hasinah, S.P, MP, Nandi Hendriana, S.T.,M.Kom dan Dinda Akhlaqulhusna S.Pt mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 bertempat di IPB International Convention Center dilaksanakan pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 yang diikuti secara *luring* sesuai dengan surat undangan Nomor B-4178/HM.130/A/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Sambutan kegiatan disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jamil yang dalam sambutannya menyampaikan terdapat 70 unit kerja yang mendapat predikat informatif, hasil ini meningkat dari tahun 2023 yang hanya 32 unit kerja yang mendapat predikat informatif. Hasil ini sejalan dengan hasil monitoring Komisi Informasi Pusat bahwa sejak 5 tahun terakhir, Kementerian Pertanian merupakan Badan Publik paling informatif diantara K/L lainnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut hadir dalam kegiatan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan pengarahan. Adapun dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa masing-masing Petugas PPID di Unit Kerja selain membuat Kementerian Pertanian Goes To Viral, nanti akan disediakan sistem untuk mempermudah aspirasi dan pengaduan dari masyarakat setiap pengaduan ada dashboardnya sehingga bisa di follow up statusnya apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Hingga pemohon bisa memberikan rating terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unit kerja. Terakhir, beliau mengajak ke semua undangan yang hadir untuk dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian, Kementerian yang reliable yang bisa menjadi solusi bagi banyak orang.

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dalam Malam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik mendapatkan peringkat 10 besar. Dalam kegiatan ini juga mengumumkan juara atau pemenang dari masing-masing kategori baik tingkat Eselon I, Eselon II, serta Eselon III. Pemeringkatan kategori Eselon I didapatkan hasil bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mendapatkan peringkat ke-1 lingkup Eselon I Kementan. Adapun rincian pemenang kategori Eselon I sebagai berikut:

1. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Inspektorat Jenderal
5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Selain itu dilaksanakan juga Pemeringkatan kategori Eselon II didapatkan hasil Peringkat 1-10 sebagai berikut:

1. Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
3. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
4. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturaden
5. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
6. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang
7. Balai Besar Veteriner Denpasar
8. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
9. Balai Besar Veteriner Wates
10. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sementara itu dalam kegiatan malam penganugerahan tersebut juga mengumumkan hasil penilaian dan juara atau pemenang kategori Eselon III Peringkat 1-10 sebagai berikut:

1. Balai Embrio Ternak
2. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

3. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu
4. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik
5. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
6. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
7. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
8. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
9. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
10. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSI Veteriner) saat ini memperoleh predikat informatif dengan peringkat ke-23 kategori Eselon II Lingkup Kementan. Sedangkan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI Ruminansia Besar) memperoleh predikat informatif dengan mendapatkan peringkat ke-27 kategori Eselon III Lingkup Kementan.



Gambar 21. Malam Penganugerahan KIP Kementan 2024

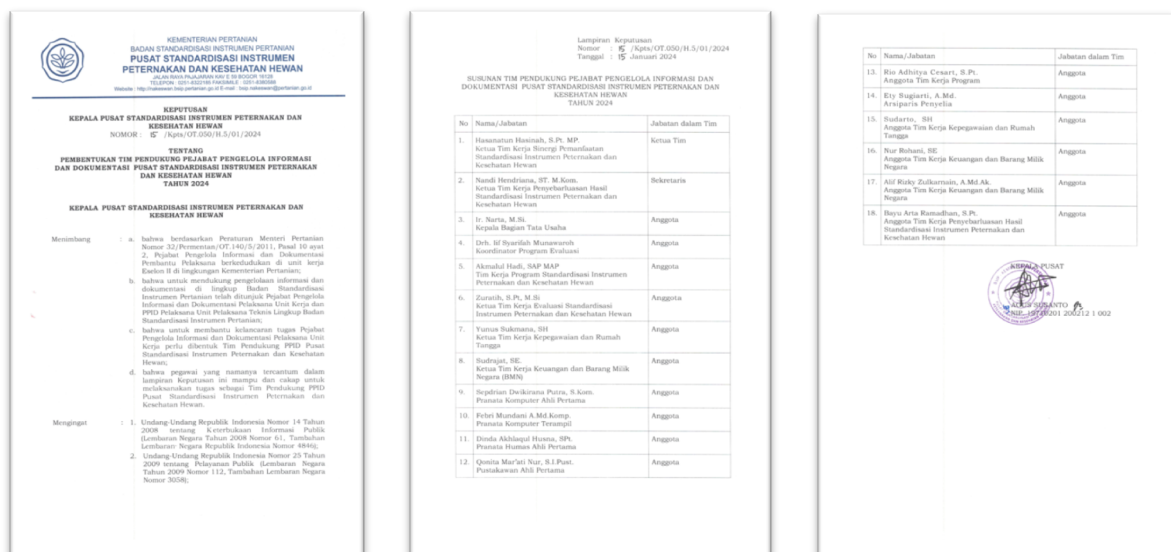
V. Sarana dan Prasarana PPID PSIPKH

5.1. SDM dan Anggaran PPID PSIPKH

PSIPKH membentuk Tim PPID yang tercantum dalam surat keputusan Kepala PSIPKH Nomor 15/Kpts/OT.050/H.5/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024.

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di PSIPKH sebagai PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT masih melekat pada Kelompok Kerja PHSI. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas UPP perlu dibekali dengan *training service of excellence*. Kriteria petugas UPP juga akan distrukturkan serta yang salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu:

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
 2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan
 3. Memiliki kemampuan bahasa Inggris
- b. Anggaran PPID PSIPKH



Gambar 22. SK Tim PPID PSIPKH TA 2024

Adapun kegiatan Pelayanan Informasi Publik/PPID Unit kerja PSIPKH telah dialokasikan ketersediaan anggaran pada DIPA PSIPKH TA 2024 yang melekat pada kegiatan Pengelolaan informasi publik peternakan dan kesehatan hewan dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

DOWNLOAD POK						
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN				
UNIT ORG	(09)	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian				
UNIT KERJA	(412013)	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan				
ALOKASI	Rp. 11,156,462,000					
Halaman : 3						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521811	Belanja.Barang.Persediaan.Barang.Konsumsi (KPPN.023-Bogor) - ATK, Bahan komputer dan bahan pembantu habis pakai lainnya	2.0 Paket	3,000,000	6,000,000	9	RM
522151	Belanja.Jasa.Profesi (KPPN.023-Bogor) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke bawah/ yg disetarakan)	4.0 OJ	900,000	3,600,000		RM
524111	Belanja.Perjalanan.Dinas.Biasa (KPPN.023-Bogor) - Perjalanan dinas dalam rangka persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan - Perjalanan dinas dalam rangka persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	18.0 OP 9.0 OP	2,500,000 2,387,778	45,000,000 21,490,000	9	RM
524113	Belanja.Perjalanan.Dinas.Dalam.Kota (KPPN.023-Bogor) - Uang transport kegiatan dalam kota/kabupaten	10.0 OK	170,000	1,700,000		RM
B	Harmonisasi dan Sinergi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen PKH			44,000,000		
521211	Belanja.Bahan (KPPN.023-Bogor) - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT - Snack Rapat Biasa JAWA BARAT	80.0 OrKal 160.0 OrKal	46,000 20,000	3,680,000 3,200,000	9	RM
522151	Belanja.Jasa.Profesi (KPPN.023-Bogor) - Honor Narasumber (Eselon III/ setara)	4.0 OJ	900,000	3,600,000		RM
524111	Belanja.Perjalanan.Dinas.Biasa (KPPN.023-Bogor) - Perjalanan dinas dalam rangka persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan - Perjalanan dinas dalam rangka persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	10.0 OP 2.0 OP	2,597,000 2,500,000	25,970,000 5,000,000	9	RM
524113	Belanja.Perjalanan.Dinas.Dalam.Kota (KPPN.023-Bogor) - Uang transport kegiatan dalam kota/kabupaten	15.0 OK	170,000	2,550,000		RM
C	Pengelolaan informasi publik peternakan dan kesehatan hewan			34,000,000		
521211	Belanja.Bahan (KPPN.023-Bogor) - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT - Snack Rapat Biasa JAWA BARAT	30.0 OrKal 30.0 OrKal	46,000 20,000	1,380,000 600,000	9	RM
524111	Belanja.Perjalanan.Dinas.Biasa (KPPN.023-Bogor) - Perjalanan dinas dalam rangka persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	12.0 OP	2,385,000	28,620,000		RM

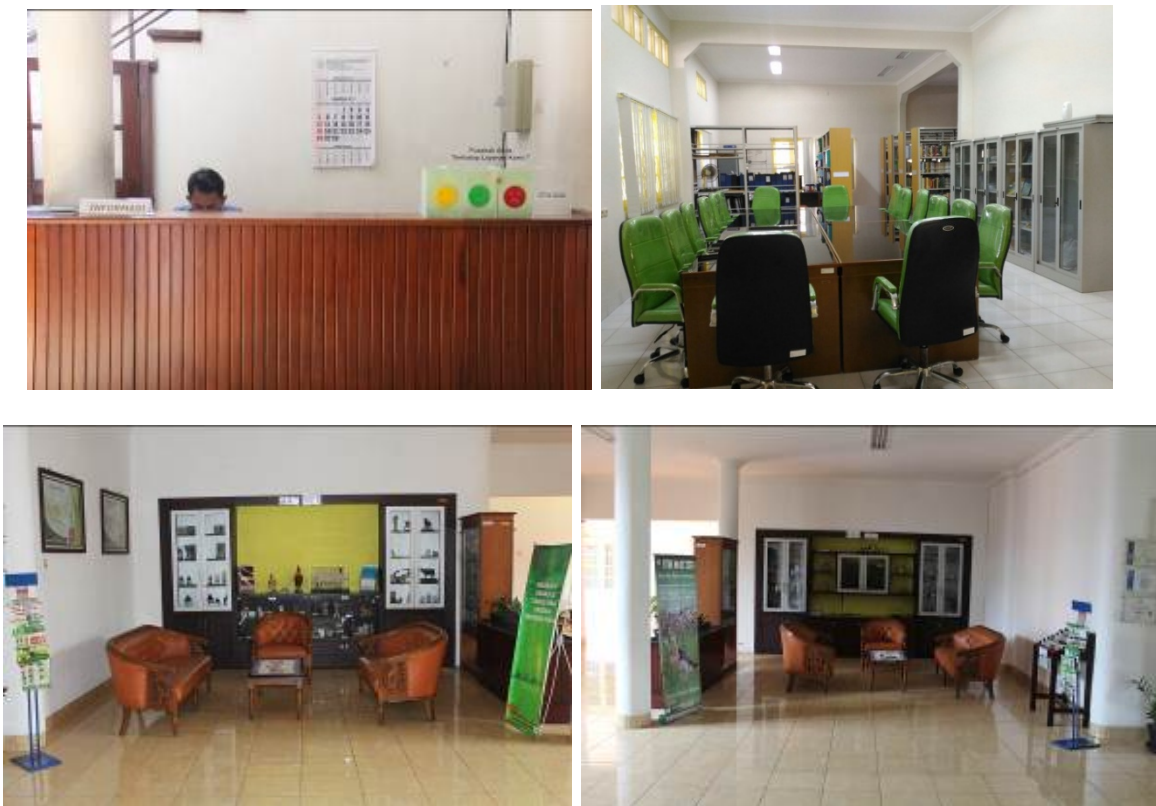
Gambar 23. Ketersediaan Anggaran PPID TA 2024

5.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi PSIPKH

Berdasarkan Surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 36.1/Kpts/OT.050/H.01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, PSIPKH melalui surat Kepala PSIPKH telah membentuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 dengan

Nomor surat 15/Kpts/OT.050/H.5/01/2024. Dengan ditetapkannya tim tersebut sehingga perlu dukungan terkait sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran kegiatan PPID di PSIPKH Tahun 2024. Sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan sudah disediakan guna untuk kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan.

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di PSIPKH telah dipersiapkan sejak 2014 dan setiap tahun sudah dilengkapi, dan sampai saat ini operasional dilakukan oleh petugas PPID, Operator serta Tim Piket Keamanan PSIPKH.



Gambar 24. Ruang Pelayanan Publik PSIPKH

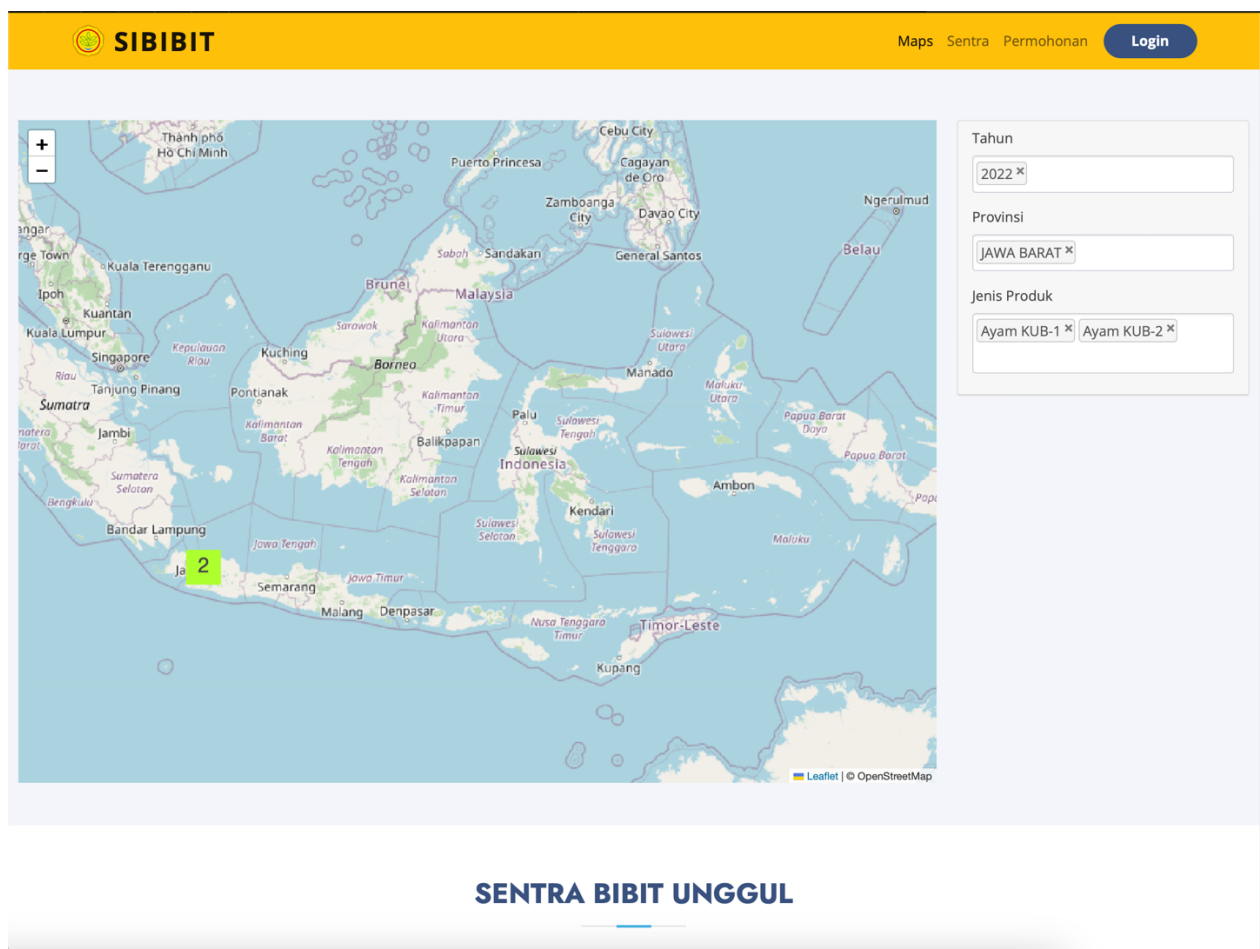
5.3. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi PSIPKH

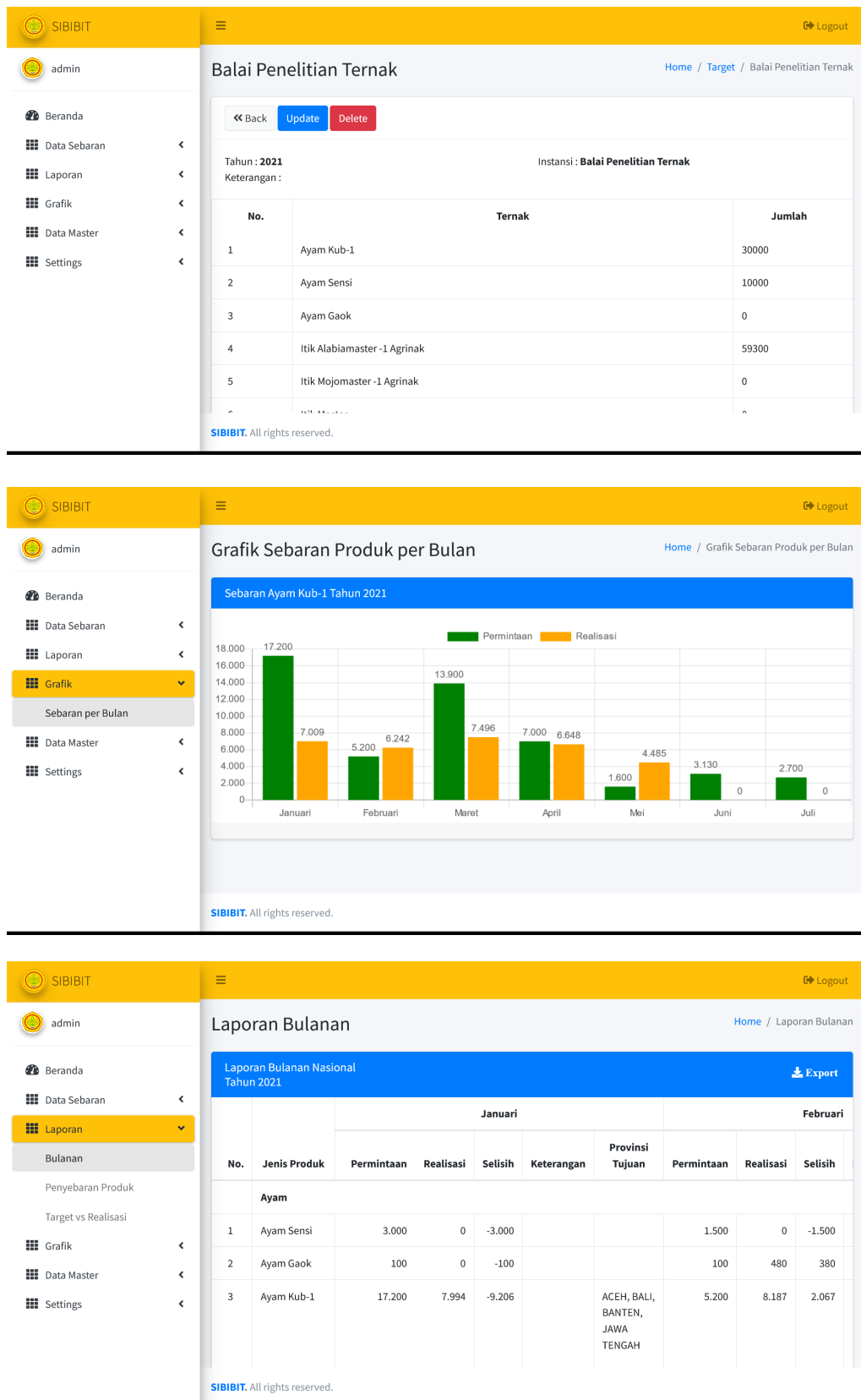
PSIPKH melakukan kolaborasi inovasi layanan informasi dalam peningkatan daya saing bibit ternak dengan menggunakan aplikasi yang diberi nama SiBIBIT. Selain itu PSIPKH juga mengembangkan aplikasi terkait pencatatan dan rekapitulasi tamu menggunakan aplikasi SiTAMU.

Sibibit merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai wadah penyimpanan data penyebaran galur ternak unggul dan benih hasil penelitian dari lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Pengguna Sibibit merupakan mitra-mitra lingkup BSIP yang terdiri dari Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang tersebar di seluruh

Provinsi yang ada di Indonesia, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup PSIPKh diantaranya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSI Veteriner), Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI UAT), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI Ruminansia Besar), dan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI Ruminansia Kecil). Untuk mendapatkan layanan SiBIBIT, pengunjung diharapkan dapat mengakses pada alamat web <https://psipkh.my.id/sibibit/>

Pengguna dapat mengisi data berupa target tahunan sesuai dengan target kinerja masing-masing lembaga, selain itu pengguna dapat mengisi perkembangan penyebaran galur serta benih setiap bulan dalam jumlah satuan ternak dan provinsi penyebaran. Data tersebut dalam direpresentasikan pada aplikasi web dalam bentuk laporan tabel dan grafik yang berisi rekapitulasi penyebaran secara keseluruhan atau per lembaga / galur ternak. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk mengetahui jumlah galur yang tersebar serta lokasi penyebaran galur tersebut, dan memudahkan laporan kepada pimpinan.





Gambar 25. Aplikasi SiBIBIT PSIPKH

Sitamu merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sistem buku tamu digital PSIPKH. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka melakukan rekap data secara digital. Tamu PSIPKH yang sebelumnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan buku tamu di sekretariat dialihfungsikan dengan menggunakan sistem informasi. Hal ini merupakan salah satu

langkah PSIPKH menuju Era Industri 4.0, dimana rekap data dilakukan secara digital (tidak menggunakan kertas / *paperless*). link akses mengisi buku Tamu PSIPKH <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/sitamu>.

Pengguna mengisi buku tamu dengan menggunakan formulir yang ditampilkan melalui peramban komputer yang telah disediakan di lobi Puslitbang Peternakan. Formulir terdiri dari nama pengunjung, NIP/NIK, alamat, email, no HP, instansi asal, bagian yang dituju (Tata Usaha, Program dan Evaluasi, atau Kerjasama dan Penyebaran Hasil Penelitian), keperluan (Konsultasi, Pelatihan/Workshop, Presentasi, Rapat/Pertemuan, dan Lain-lain), serta rombongan jika tamu datang secara berkelompok.

Admin dapat melihat rekap data melalui grafik yang ditampilkan untuk mengetahui bagian mana yang dituju pada bulan itu atau jumlah tamu pada setiap bulannya. Data juga dapat disaring sesuai dengan rentang tanggal tertentu dan diunduh dalam format PDF.

SITAMU (Sistem Informasi Buku Tamu) Home Isi Buku Tamu Login

 Selamat Datang Di Sistem Informasi Buku Tamu
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan

Klik tautan berikut untuk mengisi buku tamu

[+ Isi Buku Tamu](#)

Daftar Pengunjung Hari Ini

#	Tanggal	Bagian	Nama Pengunjung	Asal Instansi	Keperluan
No results found.					

Gambar 26. Halaman Beranda SiTamu

VI. Penutup

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet PSIPKH.

Pelayanan informasi publik di PSIPKH akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran. Proses pelayanan informasi publik di PSIPKH telah dilaksanakan sesuai SOP secara terintegrasi dan sesuai maklumat pelayanan serta senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan teknis tim pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi PPID PSIPKH 2024

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI (PPID) PSIPKH
PERIODE JANUARI - DESEMBER TA 2024

No	Bulan	Pemohon	Tanggal Permohonan	Mekanisme Permohonan	Informasi Yang Diminta	Pelayanan Permohonan (Diberikan/Ditolak)	Status Permohonan
1	Januari	-	-	-	-	-	NIHIL
2	Februari	-	-	-	-	-	NIHIL
3	Maret	-	-	-	-	-	NIHIL
4	April	-	-	-	-	-	NIHIL
5	Mei	-	-	-	-	-	NIHIL
6	Juni	-	-	-	-	-	NIHIL
7	Juli	3	2024070301/F1A -O.H/07/2024 2024071102/F1A -LS.H/07/2024 2024071103/F1A -LY.H/07/2024	Portal PPID/Silayan Online	Informasi terkait Pternakan	Diberikan	Selesai
8	Agustus	-	-	-	-	-	NIHIL
9	September	-	-	-	-	-	NIHIL
10	Oktober	-	-	-	-	-	NIHIL
11	November	1	2024103001/F1A -LY.H/10/2024	Portal PPID/Silayan Online	Informasi terkait Perjadin Kapus PSIPKH	Diberikan	Selesai
12	Desember	-	-	-	-	-	NIHIL

Lampiran 2. Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) PSIPKH TA 2024

REKAPITULASI DUMAS PSIPKH
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2024

No	Bulan	Nomor dan Tanggal Pengaduan	Nama Pengaduan	Uraian Petugas Pengaduan	Proses Penanganan	Hasil Penyelesaian Pengaduan	Ket
1	Januari	-	-	-	-	-	NIHIL
2	Februari	-	-	-	-	-	NIHIL
3	Maret	-	-	-	-	-	NIHIL
4	April	-	-	-	-	-	NIHIL
5	Mei	-	-	-	-	-	NIHIL
6	Juni	-	-	-	-	-	NIHIL
7	Juli	-	-	-	-	-	NIHIL
8	Agustus	-	-	-	-	-	NIHIL
9	September	-	-	-	-	-	NIHIL
10	Oktober	-	-	-	-	-	NIHIL
11	November	-	-	-	-	-	NIHIL
12	Desember	-	-	-	-	-	NIHIL